

Inka Kou Dingu

by UNITRI Press

Submission date: 01-Sep-2023 08:36PM (UTC-0700)

Submission ID: 2002971893

File name: Inka_Kou_Dingu.docx (50.32K)

Word count: 1218

Character count: 8316

**ANALISIS BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBD) DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA
KALISONGO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

INKA KOU DINGU

2019110015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

Untuk terus mendorong pertumbuhan dan perbaikan kota, peran penting Anggaran Pendapatan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membantu perbaikan di Kota Kalisongo, Kawasan Dau, dan Perda Malang. Menggunakan metode subyektif, fokus pada penelitian. Wawancara dengan tiga orang saksi, yakni Lurah, Sekda, dan warga Kota Kalisongo, Dau Lokal, Perda Malang, serta dokumen seperti laporan rencana keuangan Kota Kalisongo periode 2020–2022 digunakan untuk mengumpulkan informasi. Metode penilaian informasi yang digunakan sangat menarik. Temuan kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung peningkatan dinyatakan kurang ideal, mengingat pemerintah kota menghadapi kekurangan aset untuk melaksanakan tugas-tugas kota di mana tugas-tugas tersebut lebih banyak. penting daripada membayarnya. Persentase peningkatan belanja desa dari pendapatan desa di Desa Kalisongo Kabupaten Malang tahun 2020 sebanyak 109,39%, tahun 2021 sebanyak 111,61% dan tahun 2022 sebanyak 127,44% sehingga pemerintah desa mengalami defisit atau kekurangan dana untuk menutup belanja desa. Bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Desa Kalisongo Kabupaten Malang seperti pengaspalan jalan pertanian, pengaspalan jalan lingkungan dan perbaikan jalan desa sehingga mampu meningkatkan mobilitas perekonomian desa, hal ini akan mendukung kemajuan masyarakat desa.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD), Pembangunan, Pemerintah Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota ini penting karena telah diberikan wewenang untuk mengatur dan menangani kegiatan pengaturannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian kota sebagaimana tertuang dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa kota adalah batas dekat yang sah dengan batas wilayah yang dipersiapkan mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, daya tarik kualitas lingkungan hidup, karena kearifan lokal, dan penghormatan adat yang diterima dan dipertimbangkan dalam rencana otoritatif Negara Kesatuan Republik (Suhendri, 2014).

Salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan metropolitan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya keuangan kota. Dengan demikian, keuangan kota menjadi penting karena tanpa dukungan keuangan yang memadai, tidak mungkin daerah perkotaan dapat melaksanakan tugas perbaikan metropolitan dengan sukses dan kompeten. Hal ini disebabkan oleh batasan keuangan kota, yang memperhitungkan kuantitas dan jenis uang yang dihasilkan sebagai bentuk pendapatan. Menurut Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Permohonan Umum, perlu diupayakan penggunaan dan pengelolaan surplus keuangan kota seoptimal mungkin di bawah arahan kepala kota dan pemerintah kota untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sistematis, masuk akal untuk memotivasi perbaikan kota saat ini. Kekuasaan yang melibatkan uang kota. Khoiriah dan Meylina (2018) mengklaim bahwa tahapan pemantauan dan

jalannya organisasi pendukung kota yang terhubung sebagai induk yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tanggung jawab publik dan kewajiban pemerintah daerah.

Menurut Kusnadi (2012) adalah aset (aset) pilihan yang menambah modal, tetapi bukan karena tambahan dana dari pemilik atau kewajiban, melainkan karena asosiasi kota. Menerima sumber daya yang cocok untuk membantu kegiatan pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pembayaran ke kota.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemanfaatan wilayah adalah penggunaan dana provinsi yang menjadi kewenangan daerah dalam satu (satu) tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh kembali sebagian. Menurut definisi ini, belanja negara secara umum dipahami sebagai setiap penggunaan subsidi publik selama satu (satu) tahun anggaran atau suatu komitmen yang dapat mengakibatkan penurunan nilai sumber daya. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diwajibkan oleh peraturan daerah dan dipelajari serta diputuskan bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan kota (BPD). Hasilnya, kota dengan daerah otonom terkecil akan berfungsi sebagai pusat sistem desentralisasi keuangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintahan negara di dekatnya. Wajah umum pengelolaan moneter daerah adalah Rencana Penggunaan Pendapatan dan Pemanfaatan Daerah (APBD). Selain kemampuan pemerintah daerah, besaran bantuan masyarakat setempat juga berperan penting dalam pola pertumbuhan karena pembangunan metropolitan memerlukan partisipasi aktif masyarakat setempat. Untuk memastikan bahwa sistem kota

dapat berhasil menjalankan tugas utamanya dalam memberikan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat, dukungan kelompok masyarakat sekitar mencakup perencanaan dan pelaksanaan program perbaikan di kota.

⁸ Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan Sipil dan Penggunaan Moneter (APBD), yang terdiri dari kompensasi, penggunaan, dan dukungan, diperiksa dan diputuskan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Musyawarah Kota. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Organisasi Moneter Kota, Penyelenggaraan Moneter Kota oleh Pemerintah Daerah sengaja ingin diperluas.

Peneliti penelitian ini mengkaji wilayah Kota Kalisongo, Kecamatan Dau, Rezim Malang, dan Daerah Jawa Timur karena meyakini wilayah tersebut mempunyai banyak potensi di bidang pertanian, peternakan, peternakan, dan sektor pariwisata. Perlu dipahami, dari empat APBDes yang dilaksanakan pemerintah, gaji metropolitan di Kota Kalisongo, Kabupaten Dau, Pemerintahan Malang, dan Daerah Jawa Timur terus meningkat, terutama di bidang pembangunan, perbentengan daerah, dan bisnis kewilayahan.

Karena dampaknya terhadap perkembangan moneter provinsi, para analis memilih APBD sebagai topik penelitiannya. Bukan tidak mungkin, jika APBD dilaksanakan dengan baik dan efektif, program ini akan berjalan di seluruh wilayah di bawah pemerintahan terbuka, mengembangkan bantuan provinsi, dan tentunya mendorong bantuan pemerintah kepada organisasi-organisasi nasional. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai Penilaian Rencana Pendapatan dan Penggunaan Keuangan Provinsi, mengingat penulis esai eksposisi perlu

memberikan gambaran dan penjelasan tentang keadaan kesiapan dan pembagian tanggung jawab terhadap Rencana Pendapatan dan Pemanfaatan Moneter Kota pada tahun 2017. Kota Kalisongo, Daerah Dau, Pedoman Wilayah Malang, dan Kabupaten Jawa Timur. Di daerah sekitar Kota Kalisongo, pendapatan dan penggunaan kota dimaksudkan untuk membantu pembangunan kota. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Kalisongo”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pemeriksaan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBD) ditangani untuk mendukung perbaikan di Kota Kalisongo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendukung kemajuan Kota Kalisongo, perlu ditentukan bagaimana penanganan pemeriksaan biaya terhadap rencana pendapatan dan konsumsi kota (APBD).

1.4 Paradigma Penelitian

Investigasi ini menggunakan perspektif penilaian subyektif yang memikat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pengetahuan dan sebagai pembanding pengetahuan teoritis dengan pengalaman nyata, serta untuk lebih meningkatkan pemahaman penulis

tentang APBD (Penelitian Pengeluaran Pendapatan Kota dan Rencana Pengeluaran Konsumsi) dalam Mendukung Perbaikan Kota .

1.5.2 Manfaat Akademis

Dapat memperdalam ilmu bagi siswa yang masih harus belajar lagi.

1.5.3 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menularkan pengetahuan, informasi, dan pengetahuan terkait Pemeriksaan Gaji Kota dan Rencana Pengeluaran Konsumsi (APBD) dalam Mendukung Kemajuan Kota. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang untuk membantu berbagi informasi dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk perpustakaan.

1.6 Ruang Lingkup

Dalam rangka mendukung kemajuan di Kota Kalisongo, Daerah Dau, Rezim Malang, Wilayah Jawa Timur, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemeriksaan biaya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Kota (APBD). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menggunakan teknik arbitrer untuk menyajikan temuan sebagai solusi permasalahan.

Menurut Bogdan Taylor (dalam Maleong, 2012), strategi subyektif adalah pendekatan investigasi yang menghasilkan informasi khusus seperti kata-kata yang dibuat atau dinyatakan oleh orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini sering digunakan dalam penelitian dengan maksud dan tujuan pemeriksaan eksploratif (Kamayanti et al., 2022). Di Kota Kalisongo,

pemeriksaan ini dilakukan. Di Lokal Dau, Kota Kalisongo dikenal khusus untuk wilayah Rezim Malang. Terlihat jelas adanya kehidupan perkumpulan lokal yang mencerminkan adanya dukungan lokal di Kota Kalisongo, Daerah Dau, dan Rezim Malang. Badan Permusyawaratan Kota (BPD) dan Lembaga Penguatan Kelompok Masyarakat Kota (LPMD) adalah dua contoh nyata kolaborasi masyarakat lokal dalam kehidupan berjenjang.

Inka Kou Dingu

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	3%
2	repository.upi.edu Internet Source	1%
3	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
5	eprints.unisbank.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	1%

10 id.123dok.com 1 %
Internet Source

11 jdih.sumedangkab.go.id 1 %
Internet Source

12 www.kependudukankalbar.com 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Inka Kou Dingu

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
